

**DETERMINAN PENGUNGKAPAN INFORMASI KEUANGAN DALAM  
WEBSITE PEMERINTAH DAERAH**  
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat,  
Riau dan Jambi)

**ARTIKEL**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

**Fachru Rozi**

**2014/14043006**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2018**

**HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL**  
**DETERMINAN PENGUNGKAPAN INFORMASI KEUANGAN DALAM**  
**WEBSITE PEMERINTAH DAERAH**  
**(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera**  
**Barat, Riau dan Jambi)**

Oleh:  
**FACHRU ROZI**  
14043006

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode  
September 2018 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, Juli 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



**Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak**  
NIP. 19720910 199802 2 003

Pembimbing II



**Erly Mulyani, SE, M.Si**  
NIP. 1971204 200801 2 011

**DETERMINAN PENGUNGKAPAN INFORMASI KEUANGAN DALAM WEBSITE  
PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat, Riau dan  
Jambi)**

**Fachru Rozi**

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang  
Email: [Fachrorozi@gmail.com](mailto:Fachrorozi@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of regional expenditure, regional wealth, audit opinion and the level of local government independence on the disclosure of financial information in the local government website. This research uses agency theory and theory of legitimacy. This research consists of 42 sample districts / cities in West Sumatra, Riau and Jambi provinces. The results of this study show that regional expenditure, regional wealth and audit opinion do not affect the disclosure of financial information in the local government website, while the level of local government independence has a positive effect on the disclosure of financial information in the local government website.*

**Keywords:** *disclosure of financial information in local government website, regional expenditure, regional wealth, audit opinion, level of independence of local government.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh belanja daerah, kekayaan daerah, opini audit dan tingkat kemandirian pemerintah daerah terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan teori agensi dan teori legitimasi. Penelitian ini terdiri dari 42 sampel kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Hasil penelitian ini menunjukkan belanja daerah, kekayaan daerah dan opini audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah, sedangkan tingkat kemandirian pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah.

**Kata kunci :** pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah, belanja daerah, kekayaan daerah, opini audit, tingkat kemandirian pemerintah daerah.

## A. PENDAHULUAN

Indonesia memasuki era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Berdasarkan asas otonomi dan Undang-Undang 1945, pemerintah provinsi, kota dan kabupaten diberikan kebebasan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Urusan pemerintahan sebagian dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Urusan pemerintah yang pada saat sebelum reformasi sebagian besar ditangani oleh pemerintah pusat, maka setelah reformasi sebagian besar urusan pemerintah tersebut dilimpahkan ke daerah.

Transparansi merupakan isu utama setelah reformasi. Pemerintahan harus menciptakan akuntabilitas kepada publik untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik dengan cara mengungkapkan lebih banyak informasi mengenai anggaran dan keuangan. Agar terwujudnya akuntabilitas dan transparansi maka pelaksanaan pemerintahan mengharuskan informasi anggaran dan akuntabilitas disampaikan kepada publik melalui media sehingga rakyat dapat mengaksesnya (Puspita dan Martani, 2012).

Transparansi dapat dilihat dari ketersediaan suatu informasi dan kemudahan dalam memperoleh informasi tersebut untuk publik. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyebarkan informasi publik dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Teori keagenan dalam pemerintahan menjelaskan bahwa pemerintah daerah bertindak sebagai agen, sedangkan masyarakat bertindak sebagai prinsipal. Pemerintah daerah diberikan kepercayaan oleh masyarakat sebagai prinsipal untuk menjalankan dan mengelola pemerintahan dan pemerintah daerah berkewajiban untuk melaporkan informasi mengenai pengelolaan daerah kepada masyarakat (Medina, 2012).

Teori legitimasi dalam pemerintahan juga menjelaskan bahwa legitimasi adalah suatu keadaan dimana tingkah laku pemerintah sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang ada dan berlaku dalam

masyarakat, sehingga akan timbul kepercayaan atas keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Jika terdapat perbedaan antara nilai yang berlaku dalam masyarakat dan aktivitas pemerintah maka akan menimbulkan adanya *legitimacy gap* yang akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Haniffa & Cooke, 2005).

Legitimasi dalam suatu pemerintah tergantung pada ekspektasi masyarakat tentang kinerja pemerintah tersebut. Hal yang paling penting dan krusial adalah komunikasi dengan masyarakat untuk menjaga legitimasi tersebut karena dengan adanya komunikasi, masyarakat akan bisa memantau dan mengetahui kinerja dan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu media yang dapat digunakan untuk memberikan informasi dan sinyal kepada masyarakat secara efisien ialah melalui *website* resmi pemerintah daerah. Penyampaian informasi melalui *website* dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. (Haniffa & Cooke, 2005).

Penggunaan *website* sebagai media untuk mengungkapkan informasi keuangan dianggap efektif dan efisien sebagai langkah untuk meningkatkan pengendalian terhadap pemerintah daerah supaya terhindar dari tindakan korupsi serta untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah (Bertot, dkk 2010). Penggunaan *website* juga akan membuat informasi yang diungkapkan dapat tersebar lebih mudah dan cepat serta informasi tersebut bisa di akses dan digunakan oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Keluarnya Instruksi Mendagri nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang penyediaan menu TPA (transparansi pengelolaan anggaran), yang mewajibkan pemerintah daerah (kabupaten maupun kotamadya) untuk mempublikasikan 12 dokumen terkait pengelolaan anggaran pada *website* resmi pemerintah daerah merupakan bukti keseriusan pemerintah pusat untuk mendorong e-government tersebut (Agustin, 2014).

Namun, penelitian Muhammad (2012) menunjukkan bahwa *website* pemerintah daerah belum digunakan secara optimal dalam mengungkapkan informasi keuangan. Dalam konteks Sumatera Barat, riset Agustin (2014) menemukan bahwa pemerintah kabupaten maupun

kotamadya di propinsi Sumatera Barat terlihat masih belum mengoptimalkan menu transparansi pengelolaan anggaran (TPA) yang terdapat pada website resmi mereka untuk mempublikasikan dokumen pengelolaan anggaran secara lengkap dan konsisten setiap tahunnya.

Penelitian mengenai pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah telah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya, yaitu oleh Laswad *et al.*, (2005), Styles dan Tennyson (2007), Garcia dan Garcia (2010), Yurisca dan Tri (2011), Puspita (2012), Rora dan Dwi (2012), Aditya *et al.*, (2013), Martani *et al.*, (2013), Rahmad dan Haryanto (2013), Agustin (2014), Mya dan komarudin (2014), dan Ladya dan Johan (2016).

Penelitian ini menggunakan variabel belanja daerah, kekayaan daerah, opini audit dan tingkat kemandirian pemerintah daerah. Pemilihan variabel dalam penelitian ini dilakukan karena terdapat banyak hasil penelitian yang berbeda-beda dan belum konsisten, sehingga faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah belum terlihat secara jelas. Variabel dalam penelitian ini merupakan kombinasi dengan mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yaitu penelitian oleh Ladya dan Johan (2016), Rora (2010), Laswad dkk., (2005), Handayani (2010), Trisnawati dan Komarudin (2014), Sinaga (2011), Afryansyah dan Haryanto (2013), Lestiani (2008), Sari (2010), Medina (2012) dan pengembangan dari penelitian-penelitian sejenis.

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah terbagi atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat adalah memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja daerah, karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah (Pratama *et al.*, 2015).

Bentuk tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat yaitu dengan mengungkapkan informasi keuangan melalui *website*. Semakin tinggi belanja daerah maka pemerintah daerah seharusnya mengungkapkan lebih banyak informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah. Hasil penelitian Ladya dan Johan (2016) menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan dalam *website* pemerintah daerah,

sedangkan hasil penelitian Rora (2010) adalah belanja daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah.

Kekayaan daerah adalah sumber daya yang mendukung dari kegiatan operasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kekayaan daerah yang besar akan cenderung untuk disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Hal ini yang membuat masyarakat menjadi lebih tertarik dalam mengamati kinerja pemerintah daerah dan menuntut transparansi atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah agar dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah tidak terjadi penyalahgunaan (Hudoyo dan Mahmud, 2012).

Pemerintah daerah yang memiliki kekayaan daerah yang jumlahnya lebih besar akan memiliki biaya yang lebih tinggi untuk pengawasan dan akan berusaha untuk memenuhi tuntutan berupa transparansi dari masyarakat. Maka pemerintah daerah seharusnya mengungkapkan informasi keuangan secara lebih lengkap melalui *website* pemerintah daerah masing-masing (Pratama *et al.*, 2015).

Menurut Penelitian Laswad dkk., (2005), Handayani (2010) dan Trisnawati dan Komarudin (2014) menunjukkan bahwa jika kekayaan pemerintah daerah semakin besar maka pemerintah daerah akan cenderung untuk melaporkan informasi keuangan di internet. Sedangkan penelitian Afryansyah dan Haryanto (2013), Ladya dan Johan (2016) dan Sinaga (2011) menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan antara kekayaan pemerintah daerah terhadap pelaporan keuangan secara sukarela oleh pemerintah daerah di internet.

Opini audit adalah salah satu indikator dalam pengungkapan informasi keuangan dalam *website* resmi pemerintah daerah yang dilihat berdasarkan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memperoleh opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan cenderung mengungkapkan informasi keuangan pemerintah daerah melalui internet untuk memberikan sinyal pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik dan bisa untuk dipertanggungjawabkan. Jika pemerintah daerah memperoleh opini audit selain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan menimbulkan anggapan bahwasanya dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah terjadi penyimpangan terjadi penyimpangan sehingga pemerintah daerah cenderung untuk menutupi informasi keuangannya dari publik.

Penelitian Liestiani (2008) tentang tingkat pengungkapan informasi keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang menguji faktor temuan audit dan memperoleh hasil hubungan positif antara temuan audit terhadap pengungkapan informasi keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati dan Komarudin (2014) menemukan hubungan yang tidak signifikan antara opini audit terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah.

Tingkat kemandirian pemerintah daerah daerah menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai pengeluaran operasional daerah dengan pendapatan asli daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Jika suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh daerah mampu dibiayai sendiri oleh pemerintah daerahnya, menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah tersebut tergolong baik. Kinerja pemerintah daerah yang baik mencerminkan kualitas manajemen pemerintahan yang baik. Jika suatu pemerintah daerah memiliki kualitas manajemen yang baik akan cenderung untuk lebih banyak mengungkapkan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah masing-masing.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2010) yaitu hubungan positif signifikan antara tingkat Pendapatan Asli Daerah terhadap tingkat pengungkapan informasi pada *website* pemerintah daerah. Sedangkan hasil penelitian Rora (2010) menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh antara kinerja pemerintah daerah yang diukur dari rasio pendapatan asli daerah terhadap pengungkapan dan kualitas informasi dalam *website* pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, peneliti bermaksud untuk meneliti dengan judul “**Determinan Pengungkapan Informasi Keuangan dalam Website Pemerintah Daerah**”. Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi Tahun

2016.

Dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah ?
2. Apakah kekayaan daerah berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah ?

3. Apakah opini audit berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah ?
4. Apakah tingkat kemandirian pemerintah daerah berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah ?

## **B. KAJIAN TEORI**

### **1. Landasan Teori**

#### **Teori Keagenan dalam Pemerintahan**

Teori keagenan menggambarkan hubungan antara dua pihak, satu pihak bertindak sebagai agen yang beraktivitas atas kepentingan pihak lain sebagai prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Teori keagenan lebih menekankan pada hal dimana antara agen dan prinsipal bertingkah laku untuk untuk memaksimalkan keuntungan masing-masing sehingga akan muncul *agency problem*. Teori keagenan dalam pemerintahan yang bertindak selaku agen yaitu pemerintah sedangkan masyarakat bertindak sebagai prinsipal. Banker dan Paxton (1987) menyatakan bahwa hubungan agensi adalah hubungan antara pimpinan pemerintahan dengan masyarakat.

#### **Teori Legitimasi dalam Pemerintahan**

Teori legitimasi dalam sektor pemerintahan menjelaskan suatu keadaan dimana aktivitas pemerintah sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga akan timbul kepercayaan dari masyarakat atas kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah menjalankan aktivitas yang berbeda dengan masyarakat, perbedaan aktivitas antara kedua pihak akan menyebabkan timbulnya *legitimacy gap* dan akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Disisi lain, tidak konstannya nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat berarti akan ada perubahan atas nilai-nilai yang dianut, sehingga entitas harus menyesuaikan dengan persepsi baru yang dianut dalam masyarakat (Haniffa & Cooke, 2005).

#### **Pengungkapan Informasi Keuangan dalam Website Pemerintah Daerah**

Pengungkapan informasi keuangan oleh pemerintah daerah melalui internet adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat yang paling murah, cepat dan efisien. Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur tentang transparansi oleh pemerintah daerah kepada masyarakat masih terdapat

pemerintah daerah yang tidak melakukan informasi keuangan secara lengkap dalam *website* resminya.

Pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah diukur dengan menggunakan *indeks scoring* yang digunakan dalam penelitian (Garcia dan Garcia, 2010). Pada penelitian ini mengelompokkan *indeks scoring* menjadi tiga fitur utama yang dapat dipertimbangkan, untuk mengevaluasi tingkat pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah, yaitu konten informatif, format dan interaksi dengan pengguna. Penilaian pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah dengan *indeks scoring* ini merupakan penilaian yang paling mendetail dari pada beberapa penilaian menurut penelitian sejenis. Oleh karena itu penilaian dengan indeks scoring ini juga digunakan untuk menilai pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah dalam penelitian ini dengan dikombinasikan dengan *indeks scoring* yang digunakan oleh Rora (2010) dalam penelitiannya yang mengukur pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah dengan *tools* presentasi *website* yang merupakan gambaran berbagai macam perangkat internet yang dapat dioperasikan pengelola *website* pemerintah daerah sehingga *website* menjadi lebih menarik dan lebih mudah untuk diakses.

### **Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah**

Sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan.

#### **a) Perencanaan**

Perencanaan pembangunan diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Rencana pembangunan dalam lingkup pemda meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

#### **b) Penganggaran**

Penganggaran dalam pemerintah berkaitan dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk setiap program dan aktivitas dalam satuan moneter.

### **Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Ghozali dan Chariri (2007) pelaporan informasi keuangan adalah pengungkapan informasi untuk memberikan sejumlah data yang bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan data tersebut.

Informasi keuangan yang dibutuhkan berdasarkan riset terdahulu diantaranya adalah kondisi keuangan, kinerja, perencanaan dan penganggaran. Informasi tersebut diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Penyajian Laporan Keuangan, laporan keuangan merupakan sebuah laporan yang terstruktur mengenai transaksi-transaksi yang dilakukan dan posisi keuangan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan dari laporan keuangan adalah menyajikan informasi tentang posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam mengevaluasi dan membuat keputusan tentang alokasi sumber daya. Pengguna informasi dalam konteks ini adalah masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksa, pihak yang memberi donasi, investasi dan pinjaman.

#### **Belanja Daerah**

Belanja merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dan tidak akan mendapatkan pembayaran kembali oleh pemerintah dalam periode anggaran. Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (Permendagri No 21 Tahun 2011).

Belanja dapat ditemukan dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam dalam menyusun laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Belanja dibagi menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi merupakan penggolongan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga/belanja lain-lain dan belanja transfer.

## Kekayaan Daerah

Penelitian ini menggunakan total aset sebagai pengukur dari kekayaan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlakukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

## Opini Audit

Opini audit adalah pernyataan professional pemeriksa atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Auditor menyatakan pendapatnya berpijak pada audit yang dilaksanakan berdasarkan standar audit. Hasil audit BPK atas laporan keuangan adalah opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah ada empat jenis yaitu :

- 1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
- 2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
- 3) Tidak Wajar (TW)
- 4) Tidak Memberikan Pendapat (TMP)

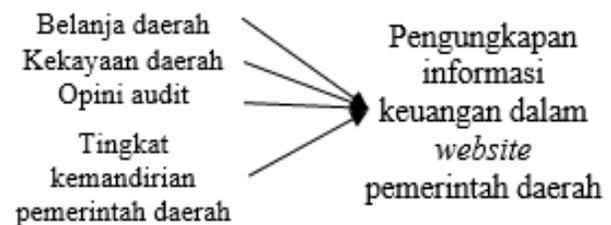
## Tingkat kemandirian pemerintah daerah

Kemandirian keuangan pemerintah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain misalnya, bantuan pemerintah pusat atau dari pinjaman. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abdul Halim, 2008).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan daerah yang sah.

## 2. Kerangka Konseptual

Pelaporan keuangan yang dilakukan melalui media internet merupakan cara yang efektif dan efisien untuk memberikan pertanggungjawaban kepada *stakeholder* (khususnya masyarakat). Styles dan Tennyson (2012) menyatakan bahwa internet adalah media yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan sarana yang efektif bagi pemerintah untuk mengungkapkan informasi keuangannya secara *online*. Namun demikian, dari pemerintah daerah yang ada, tidak semua pemerintah daerah yang memanfaatkan internet untuk mengungkapkan informasi keuangannya, dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah belanja daerah, kekayaan daerah, opini audit dan Tingkat kemandirian pemerintah daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dibentuk kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

## Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H<sub>1</sub> :Belanja daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah
- H<sub>2</sub> :Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah
- H<sub>3</sub> :Opini audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah
- H<sub>4</sub> :Tingkat kemandirian pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah

## C. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menjelaskan hubungan belanja daerah, kekayaan daerah, opini audit dan tingkat kemandirian pemerintah daerah

terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah.

## 2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah pemda yang memenuhi kriteria :

- a) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi.
- b) Pemerintah daerah yang memiliki *website* yang dapat diakses secara langsung melalui *internet*.
- c) Pemerintah daerah yang menyediakan seluruh data-data yang diperlukan untuk seluruh variabel.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, Variabel dependen penelitian ini diperoleh melalui alamat *website* pemerintah kabupaten dan kota yang ada di situs resmi Kemendagri, yaitu [www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id). Data independen penelitian ini diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masing-masing provinsi.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data variabel dependen dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi penulis terhadap masing-masing *website* pemerintah daerah. Sedangkan data variabel independen diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 yang telah diaudit dan dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

## 5. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Variabel dalam Penelitian ini menggunakan 1 variabel dependen dan 4 variabel independen.

- a. Variabel Dependen (Y), yaitu pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah yang diukur menggunakan Indeks (*checklist*) tingkat pengungkapan informasi keuangan yang merupakan penggabungan indeks pada penelitian (Garcia dan Garcia, 2010) dan (Rora dan Dwi, 2012). Setelah *score* didapatkan, maka *score* akan dibagi dengan total *score* pada indeks yaitu 30.
- b. Variabel Independen (X1), yaitu belanja daerah Belanja daerah yang diukur dengan Log (realisasi belanja).

- c. Variabel Independen (X2), yaitu kekayaan daerah yang diukur dengan total asset.
- d. Variabel Independen (X3), yaitu opini audit yang diukur dengan angka dummy. Pemerintah daerah yang memiliki opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberi bobot 1, sedangkan pemerintah daerah yang memiliki opini audit selain Wajar Tanpa Pengecualian diberi bobot 0.
- e. Variabel Independen (X4), yaitu tingkat kemandirian pemerintah daerah yang diukur dari pendapatan asli daerah berbanding dengan total pendapatan yang diterima.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Data diolah menggunakan software *evIEWS*8. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Untuk uji model terdiri dari uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji statistik F (simultan), dan uji statistik T (parsial).

## 7. Definisi Operasional Variabel

### a. Pengungkapan Informasi Keuangan dalam Website Pemerintah Daerah

Pengungkapan Informasi Keuangan dalam *website* Pemerintah Daerah adalah penyediaan informasi keuangan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui *website* resmi yang bisa di akses oleh semua pengguna informasi tersebut.

### b. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

### c. Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah adalah sumber daya yang mendukung dari kegiatan operasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Keberhasilan suatu pemerintah daerah dapat dilihat dari tingkat kekayaan daerah yang tinggi dan pengelolaan keuangan yang baik.

### d. Opini Audit

Opini audit adalah sebuah laporan yang diterbitkan oleh auditor terdaftar terkait dengan pemeriksaan yang sudah sesuai dengan norma dan aturan-aturan pemeriksaan akuntan yang diikuti dengan pendapat auditor tentang kewajaran dari laporan keuangan yang diperiksa.

#### e. Tingkat kemandirian pemerintah daerah

Tingkat kemandirian pemerintah daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Hasil

##### a. Statistik Deskriptif

Sebelum variabel penelitian dianalisis dengan model penelitian, maka data dari masing-masing variabel penelitian dideskripsikan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai masing-masing variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 1 variabel dependen yaitu pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah (PIKDWP), 4 variabel independen yaitu belanja daerah (BEDA), kekayaan daerah (KEDA), opini audit (OPAU) dan tingkat kemandirian pemerintah daerah (TKEM). Hasil analisis deskriptif dengan menggunakan *views8* dari variabel-variabel penelitian ini dapat dilihat pada lampiran (tabel 1).

Berdasarkan tabel 1 variabel pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah sebagai variabel dependen dalam penelitian ini, dimana variabel ini memiliki rata-rata 0.510634 dengan standar deviasi 0.083024, pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah tertinggi adalah 0.675000 dan terendah 0.275000. Variabel belanja daerah (BEDA) sebagai variabel independen yang memiliki rata-rata 12.06606 dengan standar deviasi 0.172053, sedangkan BEDA tertinggi adalah 12.49790 dan terendah 11.73950. Variabel kekayaan daerah (KEDA) memiliki rata-rata 12.34427 dengan standar deviasi 0.255982, dan kekayaan daerah tertinggi adalah 12.97270 dan terendah adalah 11.81020. Variabel opini audit (OPAU) memiliki rata-rata 0.853659 dengan standar deviasi 0.357839 dan opini audit tertinggi adalah 1.000000 dan terendah 0.000000. Variabel tingkat kemandirian pemerintah daerah (TKEM) memiliki rata-rata 0.086254 dengan standar deviasi 0.042718 dan tingkat kemandirian pemerintah daerah tertinggi adalah 0.230700 dan terendah adalah 0.040300.

##### b. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk membahas pengaruh variabel independen (bebas) terhadap variabel

dependen (terikat). Hasil penelitian ini dapat menentukan pengaruh BEDA, KEDA, OPAU dan TKEM terhadap PIKDWP yang dapat dilihat pada lampiran (tabel 2).

Berdasarkan tabel diatas maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\text{PIKDWP} = 0.270885 + 0.006866 (\text{BEDA}) + 0.004188 (\text{KEDA}) + 0.039514 (\text{OPAU}) + 0.828642 (\text{TKEM})$$

Angka yang dihasilkan dari pengujian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

##### a. Konstanta ( $\alpha$ )

Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 0.270885 berarti jika variabel BEDA, KEDA, OPAU dan TKEM bernilai 0, maka nilai PIKDWP adalah sebesar 0.270885.

##### b. Koefisien Regresi ( $\beta$ ) BEDA

Jika nilai variabel BEDA naik satu satuan dan nilai variabel KEDA, OPAU dan TKEM tetap maka nilai PIKDWP akan meningkat sebesar 0.006866.

##### c. Koefisien Regresi ( $\beta$ ) KEDA

Jika nilai variabel KEDA naik satu satuan dan nilai variabel BEDA, OPAU dan TKEM tetap maka nilai PIKDWP akan menurun sebesar 0.004188.

##### d. Koefisien Regresi ( $\beta$ ) OPAU

Jika nilai variabel OPAU naik satu satuan dan nilai variabel BEDA, KEDA dan TKEM tetap maka nilai PIKDWP akan menurun sebesar 0.039514.

##### e. Koefisien Regresi ( $\beta$ ) TKEM

Jika nilai variabel TKEM naik satu satuan dan nilai variabel BEDA, KEDA dan OPAU tetap maka nilai PIKDWP akan naik sebesar 0.828642.

#### c. Uji Asumsi Klasik

##### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas yang dimaksud dalam asumsi klasik pendekatan OLS adalah (data) residual yang dibentuk model regresi linier terdistribusi normal. Keputusan terdistribusi normal tidaknya residual secara sederhana dengan membandingkan nilai Probabilitas JB (Jarque-Bera). Apabila Prob. JB hitung lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal dan sebaliknya, apabila nilainya lebih kecil maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi normal. Nilai Prob. JB hitung sebesar 0.917205 > 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan telah dipenuhi. Hasil uji

normalitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada lampiran (tabel 3).

## 2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas menggunakan VIF (Variance Inflation Factors). Hasil uji multikolinieritas, dapat dilihat pada tabel kolom Centered VIF. Nilai VIF untuk variabel BEDA adalah 3.571608, nilai VIF variabel KEDA adalah 3.763346, nilai VIF variabel OPAU adalah 1.028534 dan nilai VIF variabel TKEM adalah 1.086810. Karena nilai VIF dari keempat variabel tidak ada yang lebih besar dari 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas pada keempat variabel bebas tersebut. Berdasarkan syarat asumsi klasik regresi linier dengan OLS, maka model regresi linier yang baik adalah yang terbebas dari adanya multikolinieritas. Dengan demikian, model dalam penelitian ini telah terbebas dari adanya multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini dapat dilihat pada lampiran (tabel 4).

## 3) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi pada saat residual dan nilai prediksi memiliki korelasi atau pola hubungan. Pola hubungan ini tidak hanya sebatas hubungan yang linier, tetapi dalam pola yang berbeda juga dimungkinkan. Keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi linier adalah dengan melihat Nilai Prob. F-statistic (F hitung). Apabila nilai Prob. F hitung lebih besar dari tingkat alpha 0.05 (5%) maka  $H_0$  diterima yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas, sedangkan apabila nilai Prob. F hitung lebih kecil dari tingkat alpha 0.05 (5%) maka  $H_0$  ditolak yang artinya terjadi heteroskedastisitas. Nilai Prob. F hitung sebesar 0.668406 yang berarti nilai ini lebih besar dari tingkat alpha 0.05 (5%) sehingga, berdasarkan uji hipotesis,  $H_0$  diterima yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada lampiran (tabel 5).

## 4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada pengganggu periode  $t-1$  (sebelumnya), untuk memastikan apakah model regresi linier terbebas dari autokorelasi, penelitian ini menggunakan metode Brusch-Godfrey atau LM (Lagrange Multiplier) Test. Jika nilai Prob. F hitung lebih besar dari tingkat alpha 0.05 (5%) maka  $H_0$  diterima yang artinya tidak

terjadi autokorelasi. Sebaliknya, apabila nilai Prob. F hitung lebih kecil dari 0.05 maka dapat disimpulkan terjadi autokorelasi. Nilai Prob. F (2,34) sebesar 0.9366. Nilai Prob. F hitung dalam penelitian ini lebih besar dari tingkat alpha 0.05 (5%) sehingga dapat disimpulkan berdasarkan uji hipotesis,  $H_0$  diterima yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada lampiran (tabel 6).

## d. Uji Model

### 1) Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

Uji ini digunakan untuk menguji *Goodness-fit* dari model regresi yaitu seberapa besar variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi dari nilai variabel independen yang dapat dilihat dari *adjusted R<sup>2</sup>*. Nilai *adjusted R<sup>2</sup>* yang diperoleh sebesar 0.132922. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 13.29% dan sebesar 86.71% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam model pada penelitian ini. Nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* dapat dilihat pada lampiran (tabel 2).

### 2) Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji secara bersama-sama pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, apakah model yang digunakan dapat memberikan pengaruh signifikan atau tidak yang dapat dilihat dari probabilitas (*F-statistic*). Jika *F-stat* lebih besar dari nilai kritis artinya variabel independen dalam model persamaan tersebut tidak bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya. Nilai probabilitas (*F-statistic*)  $> 0,05 = 0.057057$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam model persamaan tersebut secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai *F-statistic* dapat dilihat pada lampiran (tabel 2).

### 3) Uji Hipotesis (*t-Test*)

Berdasarkan hasil olahan data statistik pada lampiran (tabel 2), maka dapat diketahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial sebagai berikut:

- Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah belanja daerah (BEDA) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah. Berdasarkan Tabel 11, dapat diketahui bahwa koefisien  $\beta$  BEDA positif sebesar 0.006866, nilai  $t_{hitung}$  0.051138 dan tingkat signifikan 0.9595. Hal ini

berarti belanja daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  tidak terdukung.

- b) Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah kekayaan daerah (KEDA) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah. Berdasarkan Tabel 11, dapat diketahui bahwa koefisien  $\beta$  KEDA positif sebesar 0.004188, nilai  $t_{hitung}$  0.045208 dan tingkat signifikan 0.9642. Hal ini berarti kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  tidak terdukung.
- c) Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah opini audit (OPAU) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah. Berdasarkan Tabel 11, dapat diketahui bahwa koefisien  $\beta$  OPAU positif sebesar 0.039514, nilai  $t_{hitung}$  1.140565 dan tingkat signifikan 0.2616. Hal ini berarti opini audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  tidak terdukung.
- d) Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah tingkat kemandirian pemerintah daerah (TKEM) berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah. Berdasarkan Tabel 11, dapat diketahui bahwa koefisien  $\beta$  TKEM positif sebesar 0.828642, nilai  $t_{hitung}$  2.777800 dan tingkat signifikan 0.0086. Hal ini berarti tingkat kemandirian pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_4$  terdukung.

## 2. PEMBAHASAN

### a) Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan dalam Website Pemerintah Daerah

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Bentuk terselenggaranya belanja daerah seperti peningkatan pelayanan urusan wajib dan pilihan yang diantaranya berupa pelayanan dasar di bidang pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak dan mengembangkan sistem jaminan sosial.

Dari hasil analisis statistik diatas dapat diketahui bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah sehingga hipotesis yang telah diajukan tidak sesuai dengan hasil penelitian, atau dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama tidak terdukung. Hal ini mengindikasikan bahwa total belanja daerah tidak berkaitan dengan pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah.

Pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau yang memiliki belanja daerah tertinggi adalah Kabupaten Bengkalis dengan total belanja daerah sebesar Rp 3.146.734.562.971, dengan total indeks pengungkapan sebesar 0.483, total indeks pengungkapan ini tergolong rendah apabila dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki total indeks pengungkapan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwasanya dengan tingginya belanja daerah suatu daerah, tidak akan membuat pemerintah daerah tersebut mengungkapkan informasi keuangan lebih banyak dalam *website* resmi pemerintahannya.

Hasil ini sejalan dengan temuan Rora dan Martani (2010) yang menyatakan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan dan kualitas informasi dalam *website* pemerintah daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi yang memiliki belanja yang tinggi tidak secara otomatis akan melakukan pengungkapan konten informasi, memiliki presentasi *website*, format dan interaksi dengan pengguna yang tinggi pada *website*. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa belanja daerah digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pelayanan yang tinggi tidak secara otomatis akan membuat pemerintah daerah untuk mengungkapkan konten informasi dan presentasi yang juga tinggi pada *website* pemerintah daerah. Hal ini dapat disebabkan karena adanya kemungkinan bahwa belanja daerah yang tinggi tidak mencerminkan tingkat pelayanan yang tinggi, sehingga belanja daerah secara otomatis tidak akan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah.

### b) Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan dalam Website Pemerintah Daerah

Kekayaan daerah adalah sumber daya yang mendukung dari kegiatan operasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kekayaan daerah juga menunjukkan tingkat kemakmuran suatu daerah,

semakin tinggi angka kekayaan suatu daerah maka secara ekonomi telah terjadi peningkatan kemakmuran daerah tersebut.

Dari hasil analisis statistik diatas dapat diketahui bahwa kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah sehingga hipotesis yang telah diajukan tidak sesuai dengan hasil penelitian, atau dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua tidak terdukung. Apabila melihat jumlah kekayaan daerah tertinggi pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat terdapat pada Kota Padang dengan total kekayaan daerah adalah sebesar Rp 3.881.114.488.678, total kekayaan ini berbanding terbalik dengan total indeks pengungkapan hanya sebesar 0.517, indeks pengungkapan ini masih terhitung tidak cukup baik apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang memiliki total indeks pengungkapan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan daerah yang tinggi tidak akan mempengaruhi banyaknya item informasi keuangan yang diungkapkan oleh pemerintah daerah dalam *website* masing-masing pemerintah daerah.

Apabila dibandingkan rata-rata kekayaan dari masing-masing Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar Rp 1.834.993.036.097, Provinsi Riau adalah sebesar Rp 4.487.142.748.811 dan Provinsi Jambi sebesar Rp 1.985.454.417.354. Nilai kekayaan rata-rata yang dimiliki masing-masing pemerintah daerah ini, sepertinya menyebabkan rendahnya keingintahuan dari masyarakat atas kinerja pemerintah daerahnya dalam mengelola kekayaan yang dimiliki. Sebagai akibatnya, pemerintah daerah yang bersangkutan menganggap bahwa pengungkapan informasi akuntansi di internet oleh pemerintah daerah tidak terlalu diperlukan.

Jika dihubungkan dengan teori agensi, seharusnya pemerintah daerah selaku agen lebih transparan kepada masyarakat dalam mempertanggungjawabkan kekayaan daerah yang dikelolanya, walaupun nilainya tidak terlalu besar. Seiring dengan masyarakat yang sudah sangat mengenal internet saat ini, kecenderungan memanfaatkan internet sebagai media untuk mendapatkan informasi tentang kinerja pemerintah daerah juga tentunya meningkat. Seharusnya hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi pemerintah daerah untuk mengungkapkan informasi akuntansinya melalui internet sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi kepada masyarakat.

Hasil ini sejalan dengan temuan Hudoyono dan Mahmud (2014), Ladya dan Johan (2016) dan Yurisca dan Tri (2011) yang menyatakan bahwa

kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan dan kualitas informasi dalam *website* pemerintah daerah. Hasil yang senada juga dihasilkan oleh Sinaga dan Prabowo (2011) dan Afryansyah dan Haryanto (2013) yang membuktikan bahwa kekayaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan sukarela di internet oleh pemerintah daerah.

### **c) Pengaruh Opini Audit terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan dalam Website Pemerintah Daerah**

Opini audit merupakan pernyataan pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini audit adalah indikator kualitas transparansi dan akuntabilitas keuangan suatu entitas yang dilihat dan dinilai dari penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Jika suatu entitas mendapatkan opini audit WTP maka suatu entitas tersebut telah menyajikan laporan keuangannya secara baik dan cenderung akan menunjukkan sinyal kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan.

Dari hasil analisis statistik diatas dapat diketahui bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah sehingga hipotesis yang telah diajukan tidak sesuai dengan hasil penelitian, atau dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga tidak terdukung. Opini audit pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi sebagian besar mendapatkan opini audit WTP, artinya opini audit WTP yang diterima oleh pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifia dan Rizal (2016) yang menemukan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *internet financial reporting melalui e-government*. Penelitian ini menemukan bahwa opini audit WTP yang diperoleh pemerintah daerah tidak mendorong dalam melakukan pengungkapan informasi keuangan, selain itu opini selain WTP juga tidak selalu mengindikasikan bahwa kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah tersebut buruk karena kinerja pemerintah tidak hanya diukur dari hasil laporan keuangan saja. Contohnya saja terdapat beberapa kasus yang terjadi akibat adanya suap-menyuap kepada aparat BPK demi mendapatkan opini WTP, dari kasus tersebut dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa opini WTP tidak

menjamin kinerja pemerintah daerah yang baik atau terbebas dari tindak korupsi. Hasil yang senada juga didapatkan oleh Trisnawati dan Achmad (2014) yang menemukan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet.

#### **d) Pengaruh Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan dalam Website Pemerintah Daerah**

Tingkat kemandirian pemerintah daerah merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran operasional pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan asli daerah. Apabila suatu daerah memiliki kemampuan untuk membiayai sendiri aktivitas pada daerahnya menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan tersebut tergolong baik, pemerintah dengan kinerja baik sudah pasti memiliki manajemen yang baik.

Dari hasil analisis statistik diatas dapat diketahui bahwa tingkat kemandirian pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah, Sehingga hipotesis yang telah diajukan sesuai dengan hasil penelitian bahwa hipotesis keempat terdukung. Artinya, semakin tinggi tingkat kemandirian pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi maka pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintahannya juga akan semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kemampuan dari pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi untuk mengelola sendiri keuangannya dan menunjukkan kemandirian daerahnya, sehingga mereka akan cenderung untuk melakukan pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintahannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Laswad *et al.* (2005) yang menyatakan bahwa kinerja pemerintah daerah yang dilihat berdasarkan *own revenue percapita* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan sukarela informasi keuangan pada situs resminya, dimana penelitiannya fokus kepada informasi keuangan yang tersedia pada situs resmi pemerintahan. Semakin tinggi rasio kemandirian maka semakin tinggi semakin tinggi pula kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya. Pemerintah daerah yang kerjanya lebih baik cenderung menyediakan lebih banyak informasi keuangan pada situs resmi pemerintahannya.

### **E. PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan dan Implikasi**

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa belanja daerah, kekayaan daerah dan opini audit tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan dalam *Website* Pemerintah Daerah, serta tingkat kemandirian pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan dalam *Website* Pemerintah Daerah.

Penelitian ini memberikan bukti bahwa besar atau kecilnya pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah tidak dipengaruhi oleh sebagian besar faktor yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini mengindikasikan bahwa besar atau kecilnya pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah memang berasal dari niat dan kemauan dari pemerintah daerah itu sendiri untuk mengungkapkan informasi keuangan dalam *website* resminya.

#### **2. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat diperbaiki oleh peneliti selanjutnya yaitu periode penelitian ini hanya satu tahun yaitu tahun 2016 sehingga generalisasinya relatif kecil dan hasil penelitian tidak bisa menunjukkan kecenderungan yang terjadi dalam jangka waktu yang lebih panjang.

#### **3. Saran**

Dari kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini, maka dapat diberi beberapa saran yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah daerah sebagai pertimbangan membuat aturan baik tingkat internal maupun eksternal pemerintah daerah agar pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah menjadi lebih baik kedepannya dan peneliti selanjutnya agar dapat memperpanjang periode penelitian, misalnya tiga tahun berturut-turut, sehingga akan dapat menggambarkan kondisi pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah untuk jangka waktu yang lebih panjang. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel independen lainnya yang diduga berpengaruh terhadap variabel dependen seperti kompetisi politik, tingkat adopsi teknologi, jumlah pegawai yang mengurus *website* pemerintah daerah, jumlah SKPD dan IPM.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Aditya Rahman, dkk. 2013. Determinan Internet Financial Local Government Reporting di

- Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado.
- Afriansyah, R. D., & Haryanto. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi Di Internet Oleh Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(3): 1-11.
- Agustin, Henri. 2014. Publikasi Dokumen Pengelolaan Anggaran pada *Website* Pemkab/Pemkot di Propinsi Sumatera Barat. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI). Yogyakarta.
- Bertot, John C, Paul T. Jaeger, Justin M. Grimes. 2010. Using ICT to Create a Culture of Transparency : E-government and Social Media as Openness and Anti-corruption Tools for Societies. *Government Information Quarterly*. Vol 00659.
- Febrianty S.Y., dan Jatmiko W.T. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaporan Keuangan di Internet Secara Sukarela Oleh Pemda. *Jurnal Universitas Diponegoro*.
- Garcia & Garcia-Garcia. 2010. *Determinants of Online Reporting of Accounting Information by Spanish Local Government Authorities. Local Government Studies, Vol. 36, No. 5, 679-695.*
- Garcia-Sanchez et al. 2013. *Determinants of Corporate Social Disclosure in Spanish Local Government. Journal of Cleaner Production 39, 60-72.*
- Ghozali, Iman dan Anis Chariri. 2007. Teori Akuntansi. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi. Keempat.* Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, Sri. 2010. Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2006. *Jurnal Ilmu Administrasi Vol. VII, No. 2, Tahun 2010.* STIA LAN Jakarta.
- Haniffa, R. & Cooke, T.E. (2005) Impact of Culture and Governance Structure on Corporate Social Reporting, *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol. 24 Issue 5, p.391-430.
- Haryanto, Sahrudin, Arifuddin. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hendriksen, Eldon S., Michael F. van Breda. 2002. Teori Akuntansi. (Terj.). Herman Wibowo. Batam : Interaksara.
- Hilmi, Amiruddin Z dan Dwi Martani. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin, 20-23 September 2012.
- Hudoyo, Y. T., & Mahmud A. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Di Internet Oleh Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 3 (4) : 485-492.
- Jensen, M., & Meckling, W. 1976. *Theory of The Firm : Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics 3, 305-360.*
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2012. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.52/1797/SJ Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Khasanah, N.L. & Rahardjo, S. N. 2014. Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 3, No. 3, Hal 1-11.*
- Ladya, Risqa A.R.S & Johan Arifin. 2016. Determinan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan dalam *Website* Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XX Jember, 2017
- Laswad, Fawzi et al. 2005. *Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities. Journal of Accounting and Public Policy*, 24; 101–121.
- Liestiani, A. (2008). Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2006. Depok: Skripsi Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Lindholm, C.K. 1994. *The Implications of Organizational Legitimacy for Corporate Social Performance and Disclosure.* New York : *Critical Perspectives on Accounting Conference.*
- Marston, C., & Polei, A. (2005). *Corporate Reporting on The Internet by German Companies. International Journal of Accounting Information Systems*, 5(3): 285-311.

- Martani, et al. 2013. *Disclosure of Non-Financial Information about Public Service on the Official Website of Local Governments in Indonesia*.
- Martani, et al. 2014. *Financial and Performance Transparency on The Local Government Websites in Indonesia. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, Vol. 60, No. 3*.
- Medina, Febri. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah Indonesia.
- Muhammad, Bagus H. P. 2012. Analisis Tingkat Pengungkapan Informasi Keuangan Dan Non Keuangan Dalam Perspektif *E-Government* pada *Website* Pemerintah Kota/Kabupaten Di Indonesia.
- Moon, J. 2002. *The Evolution of E-government Among Municipalities: Rhetoric or Reality?. Public Administration Review, 62 (4), 424-433*.
- Mya Dewi Trisnawati dan Komarudin Achmad. 2014. Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. Simposium Nasional Akuntansi XVII Mataram.
- Nordiawan, dkk. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Pratama, K. A. D., Werastuti, D. N. S., & Sujana, E. (2015). Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1, 3(1): 1-12*.
- Puspita, R., & Martani, D. (2012). Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam *Website* Pemda. Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin, 20-22 September 2012.
- Rahmad Dian Arfryansyah dan Haryanto. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet oleh Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 2, No. 3, Tahun 2013*.
- Rahman, Aditya dkk. 2013. *Determinan Internet Financial Local Government Reporting* di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado, 25-28 September 2013.
- Ratmono, D. (2013). Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Internet: Pengujian Teori Institusional dan Keagenan. *Media Ilmiah Akuntansi, 1(2): 28-48*.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2003. Instruksi Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2005. Undang-Undang Republik Indonesia No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2010. Undang-Undang Republik Indonesia No 71 Tahun 2010 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2011. Praturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Rora Puspita . 2012. Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap

- Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi Dalam Website Pemda. Depok.
- Sekaran, Uma, 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(2): 154–170.
- Sinaga, Y. F. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Di Internet Secara Sukarela Oleh Pemerintah Daerah. Skripsi FEB UNDIP Semarang.
- Sari, Rora Puspita. 2010. Pengaruh Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Pemerintah Daerah di Indonesia pada Situs Pemerintah Daerah Tahun 2010. Depok: Skripsi Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Styles, Alan K., and Tennyson, Mack. 2007. *The Accessibility of Financial Reporting U.S. Municipalities on The Internet. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*. Vol. 19, No. 1, pp: 56-92.
- Suchman, M. C. 1995. *Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approachs. Academy of Management Journal* , Vol. 20, No. 3, 571-610.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suwardi, A. 2012. *Data Panel: Teori Dasar dan Aplikasi di STATA*. Departemen Ilmu Ekonomi –Universitas Indonesia.
- Trisnawati, M, D., & Achmad, K., 2014. Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemda melalui Internet. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram. Lombok.
- Xiao, J. Z., Yang, H., & Chouw, C. W. (2004). *The Determinants and Characteristics of Voluntary Internet- based disclosures by listed Chinese Companies. Journal of Accounting and Public Policy*, 23 (3): 191-225.
- Yentifa. 2010. *Kebutuhan Investor dan Kreditor atas Informasi dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Purwokerto.
- Yurisca Febriyanty Sinaga dan Tri Jatmiko Wahyu Prabowo. 2011. Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan di Internet Secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah.

**LAMPIRAN**  
**Tabel 1**  
**Statistik Deskriptif**

(N=41)

Variabel	Mean	Max	Min	Std. Dev.
PIKdWP	0.510634	0.675000	0.275000	0.083024
BEDA	12.06606	12.49790	11.73950	0.172053
KEDA	12.34427	12.97270	11.81020	0.255982
OPAU	0.853659	1.000000	0.000000	0.357839
TKEM	0.086254	0.230700	0.040300	0.042718

(Sumber: Data yang diolah, 2018)

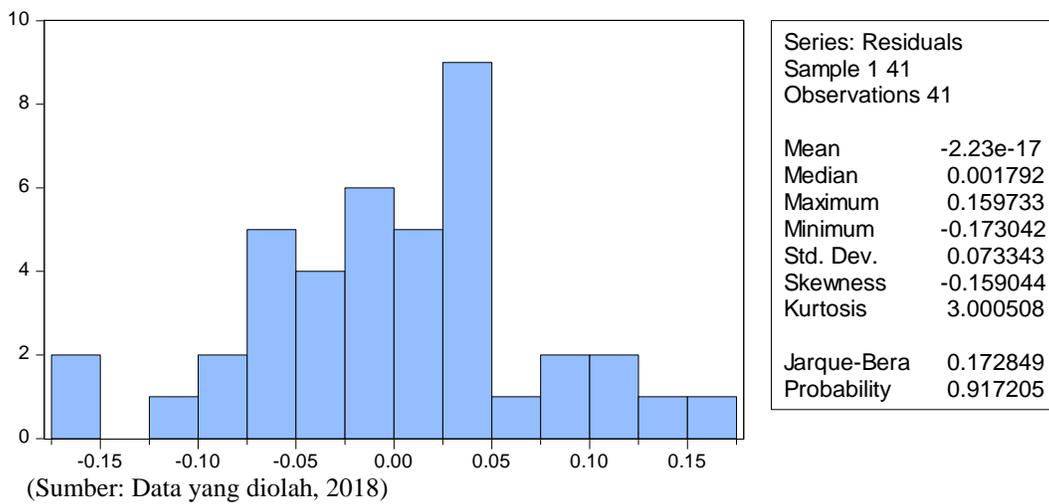
**Tabel 2**  
**Regresi Linier Berganda**

Dependent Variable: PIKDWP  
Method: Least Squares  
Date: 07/06/18 Time: 17:10  
Sample: 1 41  
Included observations: 41

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.270885	0.895997	0.302328	0.7641
BEDA	0.006866	0.134268	0.051138	0.9595
KEDA	0.004188	0.092636	0.045208	0.9642
OPAU	0.039514	0.034644	1.140565	0.2616
TKEM	0.828642	0.298309	2.777800	0.0086
R-squared	0.219630	Mean dependent var		0.510634
Adjusted R-squared	0.132922	S.D. dependent var		0.083024
S.E. of regression	0.077310	Akaike info criterion		-2.168143
Sum squared resid	0.215165	Schwarz criterion		-1.959171
Log likelihood	49.44693	Hannan-Quinn criter.		-2.092047
F-statistic	2.532985	Durbin-Watson stat		1.838810
Prob(F-statistic)	0.057057			

(Sumber: Data yang diolah, 2018)

**Tabel 3**  
**Uji Normalitas**



**Tabel 4**  
**Uji Multikolinearitas**

Variance Inflation Factors

Date: 07/07/18 Time: 12:24

Sample: 1 41

Included observations: 41

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.802811	5507.165	NA
BEDA	0.018028	18008.60	3.571608
KEDA	0.008581	8974.095	3.763346
OPAU	0.001200	7.028314	1.028534
TKEM	0.088988	5.628335	1.086810

(Sumber: Data yang diolah, 2018)

**Tabel 5**  
**Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: Glejser

---

---

F-statistic	0.595161	Prob. F(4,36)	0.6684
Obs*R-squared	2.543117	Prob. Chi-Square(4)	0.6369
Scaled explained SS	2.355083	Prob. Chi-Square(4)	0.6708

---

---

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Date: 07/07/18 Time: 12:29

Sample: 1 41

Included observations: 41

---

---

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.143990	0.537209	0.268035	0.7902
BEDA	0.023649	0.080503	0.293761	0.7706
KEDA	-0.027610	0.055542	-0.497109	0.6221
OPAU	-0.021944	0.020771	-1.056484	0.2978
TKEM	-0.149361	0.178855	-0.835093	0.4092

---

---

R-squared	0.062027	Mean dependent var	0.056892
Adjusted R-squared	-0.042192	S.D. dependent var	0.045404
S.E. of regression	0.046352	Akaike info criterion	-3.191244
Sum squared resid	0.077347	Schwarz criterion	-2.982272
Log likelihood	70.42051	Hannan-Quinn criter.	-3.115148
F-statistic	0.595161	Durbin-Watson stat	1.799827
Prob(F-statistic)	0.668406		

---

---

(Sumber: Data yang diolah, 2018)

**Tabel 6**  
**Uji Autokorelasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

---

---

F-statistic	0.065579	Prob. F(2,34)	0.9366
Obs*R-squared	0.157553	Prob. Chi-Square(2)	0.9242

---

---

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares  
 Date: 07/07/18 Time: 12:32  
 Sample: 1 41  
 Included observations: 41  
 Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.029226	0.924819	-0.031602	0.9750
BEDA	0.002601	0.138235	0.018815	0.9851
KEDA	-0.000147	0.095169	-0.001549	0.9988
OPAU	-0.000118	0.035611	-0.003326	0.9974
TKEM	-0.003646	0.307772	-0.011847	0.9906
RESID(-1)	-0.024887	0.184302	-0.135033	0.8934
RESID(-2)	0.062194	0.183979	0.338052	0.7374
R-squared	0.003843	Mean dependent var		-2.23E-17
Adjusted R-squared	-0.171950	S.D. dependent var		0.073343
S.E. of regression	0.079398	Akaike info criterion		-2.074432
Sum squared resid	0.214338	Schwarz criterion		-1.781871
Log likelihood	49.52586	Hannan-Quinn criter.		-1.967898
F-statistic	0.021860	Durbin-Watson stat		1.792332
Prob(F-statistic)	0.999947			

(Sumber: Data yang diolah, 2018)